



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN MAJASARI

Alamat : Kp. Maja Masjid RT/RW 005/005 Kel. Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang Prov. Banten 42217
Email : panwaslumajasari@gmail.com

Majasari, 22 Juli 2024

Nomor : 016/ KP.01.00/K.BT-02.34/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Aparatur Pemerintah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024

- | | |
|---|---|
| 1. Camat Majasari; | 9. Lurah se-Kecamatan Majasari; |
| 2. Koramil Kecamatan Majasari; | 10. Ketua MUI Kecamatan Majasari; |
| 3. Polsek Kecamatan Majasari; | 11. Ketua Forum MDTA Kecamatan Majasari; |
| 4. Kepala KUA Kecamatan Majasari; | 12. Ketua FSPP Kecamatan Majasari; |
| 5. Kormin Pendidikan Kecamatan Majasari; | 13. Kepala sekolah SD/MI se-Kecamatan Majasari; |
| 6. Korluh Pertanian Kecamatan Majasari; | 14. Kepala SMP/MTS se-Kecamatan Majasari; |
| 7. Korluh BP3AKB Kecamatan Majasari; | 15. Kepala SMA/SMK/MA se-Kecamatan Majasari; |
| 8. Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Majasari; | 16. BPD, LPM, RT/RW, PKK, Kader Posyandu dan Karang Taruna; |

di -

Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Majasari mengimbau agar memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

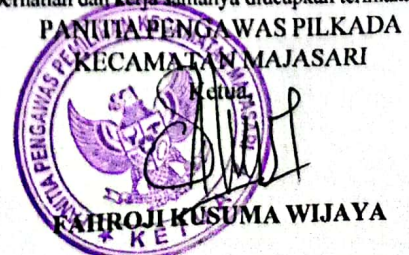
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
12. Imbauan Bawaslu RI nomor 810/PM.00.00/K1/11/2023 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Panwaslu Kecamatan Majasari Mengimbau Kepada ASN, TNI, POLRI, LURAH, Perangkat Kelurahan, BPD, LPM, PKK, Kader Posyandu, RT/RW dan Karang Taruna se Kecamatan Majasari untuk Tidak Terlibat dan Ikut Serta dalam Pelaksanaan Kampanye serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama dalam pelaksanaannya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip